

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengakuan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Surat Perintah Kerja (SPK) yang menjadi dasar dalam perolehan aset tetap menggunakan nilai perolehan karena saat pembuatan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai sudah menghitung semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap itu diperoleh.
2. Pengukuran aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai mengenai penilaian awal, penyusutan, dan Penghentian dan pelepasan aset tetap sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
3. Pengungkapan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Namun mengenai informasi metode penyusutan yang digunakan untuk melakukan penyusutan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai belum diungkapkan pada Laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
4. Penyajian aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Manggarai sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka saran yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai diharapkan lebih terperinci dalam menyediakan data yang berkaitan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan menyertakan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap diperoleh agar saat pengakuan ataupun penilaian awal aset tetap yang diperoleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dapat mengetahui aset tetap yang diperoleh tersebut diperoleh berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai diharapkan dapat mengungkapkan metode penyusutan yang digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap aset tetap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
3. Mengenai penghentian dan pelepasan aset tetap ada atau tidaknya penghentian dan pelepasan aset tetap diharapkan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
4. Sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dalam laporan keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) lebih terperinci dalam menjelaskan pos-pos aset tetap

sehingga saat terjadi penambahan atau pun berkurangnya aset tetap dapat diketahui penyebabnya.

5. Sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai lebih meningkatkan lagi pelatihan/diklat untuk menambah wawasan mengenai laporan keuangan dan kinerja pegawai, karena yang ditemui di lapangan yaitu keterbatasan kemampuan pegawai dalam memahami Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting Principles Board. (1970). *Apb Statement No.4 Basic Concepts And Accounting Principles Underlying Financial Statement Of Business Enterprises*. Aicpa.
- Arinta, Kustadi. 1996. *Pengantar Akuntansi Pemerintahan*. CitraAditya Bakti: Bandung.
- Auliana. 2010. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.
- Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar. 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting "Pengantar Akuntansi"*, Buku 2, Edisi 21, Salemba Empat: Jakarta.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- BPK RI tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 Ringkasan Eksekutif.
- Dwi, Martani. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Salemba Empat: Jakarta.
- Financial Accounting Standards Board (FASB). 1980. *"Statement of Financial Accounting Concepts No.2: Qualitative Characteristics of Accounting Information"*. Stamford. Connecticut.
- Fitriyah, Zainiyah Lailatul. 2018. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Daerah Dalam Lapoiran Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. *Jurnal Riset akuntansi Volume 1 Nomor 2 Desember 2018*.
- Halim, Abdul. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Harrison, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan IFRS Edisi Kedelapan Jilid 1*. Harrison Jr., Walter T., et al. 2012. *Akuntansi Keuangan IFRS Edisi Kedelapan Jilid 1*. Erlangga: Jakarta.
- Kartikahadi, Hans, dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. IAI: Jakarta.

- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press: Yogyakarta.
- Media Online Manggarai.co.id. 2018, 05 juni. Pemerintah Kabupaten Manggarai (Online). <https://www.manggarai.co.id/berita.php?read=515>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
- Media Online Tribune News..2018, 20 Oktober. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan NTT.(online). <https://kupang.tribunnews.com/2018/10/20/9-permasalahan-yang-ditemukan-dalam-periksaan-bpk>.Diakses pada tanggal 25 Mei 2020.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Salemba Empat:Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010Tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.
- Reevrisond, Baswir. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*.BPFE.Yogyakarta.
- Rudianto.2012. *Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*.Erlangga:Jakarta.
- S.M. Novi Priyati. 2013. *Pengantar Akuntansi*. Indeks: Jakarta.
- Shahab Abdullah. 1998. *Teori dan Problem Accounting Principles* Edisi ke-12. SAS:Bandung.
- Sugiono. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Indeks:Jakarta.
- Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai
- Tipan, A., Saerang, D. P. E., 2016. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara.Volume11.Nomor1.*Jurnal EMBA*. FEB UNSRAT: Manado.
- Wati, Nur Fitriana .2011. Perlakuan Kuntansi Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. *Skripsi*.Fakultas Ekonomi Dan Bisnis niversitas Airlangga Surabaya.
- Yusandri. 2018. Perlakuan Akuntansi berdasarkan peraturan SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Lumajang periode 2017. *Skripsi*.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas jember.